



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 39 /P/M.KOMINFO/12/2008

TENTANG

**DAERAH EKONOMI MAJU DAN DAERAH EKONOMI KURANG MAJU
DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf e dan Pasal 36 huruf h Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAERAH EKONOMI MAJU DAN DAERAH EKONOMI KURANG MAJU DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

Pasal 1

Daerah penyelenggaraan penyiaran diklasifikasikan dalam:

- a. Daerah Ekonomi Maju dan
- b. Daerah Ekonomi Kurang Maju

Pasal 2

- (1) Daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan Indeks Potensi dan Kemajuan Daerah dari daerah yang bersangkutan.
- (2) Indeks Potensi dan Kemajuan Daerah yang selanjutnya disebut IKPD merupakan komposit indeks dari Indeks Geografis (IG), Indeks Demografis (ID), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Ekonomi (IE) dan Indeks Bisnis (IB).

Pasal 3

- (1) Indeks Geografis (IG) sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan parameter Luas Wilayah (lw) dan Proporsi Desa Urban (lu)

dalam suatu kabupaten/kota.

- (2) Indeks Demografis (ID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan parameter jumlah penduduk (Ip) dan kerapatan penduduk (Ik) dalam suatu Kabupaten/Kota.
- (3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) direpresentasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hasil perhitungan Badan Pusat Statistik yang dikaitkan dengan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- (4) Indeks Ekonomi (IE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan representasi dari kemampuan ekonomi masyarakat di suatu kabupaten/kota.
- (5) Indeks Bisnis (IB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan indeks yang direpresentasikan dengan parameter sarana dan prasarana bisnis (Ispb) yang tersedia dalam suatu kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Daerah ekonomi maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masyarakat serta wilayahnya telah berkembang dalam skala nasional.
- (2) Daerah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

Pasal 5

- (1) Daerah ekonomi maju dikelompokkan ke dalam:
 - a. Zona 1;
 - b. Zona 2; dan
 - c. Zona 3;
- (2) Daerah daerah ekonomi kurang maju dikelompokkan ke dalam :
 - a. Zona 4; dan
 - b. Zona 5.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah klasifikasi daerah berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Penentuan klasifikasi daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju beserta zona penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak termasuk dalam zona sebagaimana diklasifikasikan dalam pasal 6, mengingat DKI Jakarta tidak mempunyai daerah otonom kabupaten/kota.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD NUH

Salinan Peraturan Menteri ini, disampaikan kepada Yth:

1. Presiden RI;
2. Pimpinan DPR-RI;
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Jaksa Agung RI;
5. Kepala Kepolisian RI;
6. Para Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
7. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia;
8. Para Eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah seluruh Indonesia; dan
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel Depkominfo seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR : 39 /P/M.KOMINFO/ 12 /2008
 TANGGAL : 30 Desember 2008

1. KLASIFIKASI DAERAH EKONOMI MAJU TINGKAT PROVINSI

NO	DAERAH EKONOMI MAJU
ZONA 1	
1.	Provinsi Jawa Barat
2.	Provinsi Jawa Tengah
3.	Provinsi Jawa Timur
ZONA 2	
4.	Provinsi Sumatera Utara
5.	Provinsi Banten
6.	Provinsi Riau Kepulauan
7.	Provinsi D. I. Yogyakarta
8.	Provinsi Kalimantan Timur
ZONA 3	
9.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10.	Provinsi Sumatera Barat
11.	Provinsi Riau
12.	Provinsi Jambi
13.	Provinsi Sumatera Selatan
14.	Provinsi Bangka Belitung
15.	Provinsi Bengkulu
16.	Provinsi Lampung
17.	Provinsi Bali
18.	Provinsi Kalimantan Barat
19.	Provinsi Kalimantan Tengah
20.	Provinsi Sulawesi Utara
21.	Provinsi Sulawesi Selatan
22.	Provinsi Maluku

2. KLASIFIKASI DAERAH EKONOMI KURANG MAJU TINGKAT PROVINSI

NO.	DAERAH EKONOMI KURANG MAJU
ZONA 4	
1.	Provinsi Gorontalo
2.	Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Provinsi Sulawesi Barat
4.	Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	DAERAH EKONOMI KURANG MAJU
5.	Provinsi Kalimantan Selatan
6.	Provinsi Nusa Tenggara Barat
7.	Provinsi Nusa Tenggara Timur
8.	Provinsi Maluku Utara
9.	Provinsi Papua Barat
ZONA 5	
10.	Provinsi Papua

3. KLASIFIKASI DAERAH EKONOMI MAJU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	DAERAH EKONOMI MAJU
ZONA 1	
1.	Kota Lhokseumawe
2.	Kota Medan
3.	Kota Binjai
4.	Kota Pekanbaru
5.	Kota Batam
6.	Kota Palembang
7.	Kota Metro
8.	Kabupaten Bogor
9.	Kabupaten Bandung
10.	Kota Bekasi
11.	Kota Bogor
12.	Kabupaten Tangerang
13.	Kota Cilegon
14.	Kota Tangerang
15.	Kabupaten Serang
16.	Kabupaten Cilacap
17.	Kabupaten Klaten
18.	Kota Surakarta
19.	Kota Semarang
20.	Kabupaten Sleman
21.	Kota Yogyakarta
22.	Kabupaten Malang
23.	Kabupaten Sidoarjo
24.	Kota Kediri
25.	Kota Malang
26.	Kota Surabaya
27.	Kota Balikpapan
28.	Kota Bontang
29.	Kota Manado
30.	Kota Makassar
31.	Kota Denpasar
ZONA 2	
32.	Kota Banda Aceh
33.	Kabupaten Labuhan Batu
34.	Kabupaten Deli Serdang
35.	Kota Pematang Siantar
36.	Kota Tebing Tinggi
37.	Kota Padang
38.	Kota Bukit Tinggi

NO	DAERAH EKONOMI MAJU
39.	Kota Payakumbuh
40.	Kota Dumai
41.	Kabupaten Bengkalis
42.	Kabupaten Siak
43.	Kabupaten Kepulauan Riau/Bintan
44.	Kota Jambi
45.	Kota Bengkulu
46.	Kota Bandar Lampung
47.	Kabupaten Garut
48.	Kabupaten Cirebon
49.	Kabupaten Sumedang
50.	Kabupaten Indramayu
51.	Kabupaten Purwakarta
52.	Kabupaten Banyumas
53.	Kabupaten Kebumen
54.	Kabupaten Purworejo
55.	Kabupaten Magelang
56.	Kabupaten Boyolali
57.	Kabupaten Sukoharjo
58.	Kabupaten Pati
59.	Kabupaten Kudus
60.	Kabupaten Jepara
61.	Kabupaten Semarang
62.	Kabupaten Pekalongan
63.	Kabupaten Pemalang
64.	Kabupaten Tegal
65.	Kota Magelang
66.	Kota Pekalongan
67.	Kota Salatiga
68.	Kota Tegal
69.	Kabupaten Bantul
70.	Kabupaten Tulungagung
71.	Kabupaten Blitar
72.	Kabupaten Kediri
73.	Kabupaten Jember
74.	Kabupaten Banyuwangi
75.	Kabupaten Mojokerto
76.	Kabupaten Jombang
77.	Kabupaten Magetan
78.	Kabupaten Gresik
79.	Kota Blitar
80.	Kota Mojokerto
81.	Kota Madiun
82.	Kota Batu
83.	Kota Pontianak
84.	Kota Palangkaraya
85.	Kota Banjarmasin
86.	Kota Samarinda
87.	Kabupaten Kutai Kartanegara
88.	Kota Palu
89.	Kabupaten Badung
90.	Kabupaten Gianyar
91.	Kota Mataram
92.	Kota Kupang
93.	Kabupaten Mimika
94.	Kota Sorong,
ZONA 3	
95.	Kabupaten Aceh Besar
96.	Kabupaten Bireun
97.	Kota Sabang
98.	Kota Langsa
99.	Kabupaten Mandailing Natal

NO	DAERAH EKONOMI MAJU
100.	Kabupaten Tapanuli Selatan
101.	Kabupaten Tapanuli Tengah
102.	Kabupaten Tapanuli Utara
103.	Kabupaten Toba Samosir
104.	Kabupaten Nias
105.	Kabupaten Serdang Berdagai
106.	Kota Sibolga
107.	Kota Tanjung Balai
108.	Kota Padang Sidempuan
109.	Kabupaten Pesisir Selatan
110.	Kabupaten Tanah Datar
111.	Kabupaten Padang Pariaman
112.	Kabupaten Agam
113.	Kabupaten Limapuluh Koto
114.	Kabupaten Pasaman
115.	Kabupaten Pasaman Barat
116.	Kota Solok
117.	Kota Sawahlunto
118.	Kota Padang Panjang
119.	Kota Pariaman
120.	Kabupaten Solok
121.	Kabupaten Rokan Hilir
122.	Kabupaten Kampar
123.	Kabupaten Kuantan Singingi
124.	Kabupaten Indragiri Hulu
125.	Kabupaten Indragiri Hilir
126.	Kabupaten Pelalawan
127.	Kabupaten Rokan Hulu
128.	Kabupaten Karimun
129.	Kota Tanjung Pinang
130.	Kabupaten Bungo
131.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
132.	Kabupaten Muaro Jambi
133.	Kabupaten Batanghari
134.	Kabupaten Merangin
135.	Kabupaten Kerinci
136.	Kabupaten Ogan Komering Ulu
137.	Kabupaten Banyuasin
138.	Kota Prabumulih
139.	Kota Pagar Alam
140.	Kabupaten Ogan Komering Ilir
141.	Kabupaten Muara Enim
142.	Kota Lubuk Linggau
143.	Kabupaten Musi Banyuasin
144.	Kabupaten OKU Timur
145.	Kota Pangkal Pinang
146.	Kabupaten Bangka
147.	Kabupaten Belitung
148.	Kabupaten Bangka Barat
149.	Kabupaten Belitung Timur
150.	Kabupaten Bengkulu Utara
151.	Kabupaten Tanggamus
152.	Kabupaten Lampung Selatan
153.	Kabupaten Lampung Timur
154.	Kabupaten Lampung Tengah
155.	Kabupaten Lampung Utara
156.	Kabupaten Tulang Bawang
157.	Kabupaten Way Kanan
158.	Kabupaten Cianjur
159.	Kabupaten Tasikmalaya
160.	Kabupaten Ciamis
161.	Kabupaten Kuningan
162.	Kabupaten Majalengka
163.	Kabupaten Subang

NO	DAERAH EKONOMI MAJU
164.	Kabupaten Sukabumi
165.	Kota Banjar
166.	Kabupaten Lebak
167.	Kabupaten Pandeglang
168.	Kabupaten Purbalingga
169.	Kabupaten Banjarnegara
170.	Kabupaten Kebumen
171.	Kabupaten Purworejo
172.	Kabupaten Wonosobo
173.	Kabupaten Boyolali
174.	Kabupaten Wonogiri
175.	Kabupaten Sragen
176.	Kabupaten Grobogan
177.	Kabupaten Bora
178.	Kabupaten Rembang
179.	Kabupaten Demak
180.	Kabupaten Temanggung
181.	Kabupaten Batang
182.	Kabupaten Brebes
183.	Kabupaten Kulon Progo
184.	Kabupaten Gunung Kidul
185.	Kabupaten Pacitan
186.	Kabupaten Ponorogo
187.	Kabupaten Trenggalek
188.	Kabupaten Lumajang
189.	Kabupaten Pasuruan
190.	Kabupaten Nganjuk
191.	Kabupaten Madiun
192.	Kabupaten Ngawi
193.	Kabupaten Bojonegoro
194.	Kabupaten Tuban
195.	Kabupaten Lamongan
196.	Kabupaten Sumenep
197.	Kabupaten Probolinggo
198.	Kota Probolinggo
199.	Kota Pasuruan
200.	Kabupaten Pontianak
201.	Kabupaten Sanggau
202.	Kabupaten Ketapang
203.	Kabupaten Kapuas Hulu
204.	Kabupaten Murung Raya
205.	Kabupaten Pulang Pisau
206.	Kabupaten Katingan
207.	Kabupaten Barito Utara
208.	Kabupaten Barito Selatan
209.	Kabupaten Kapuas
210.	Kabupaten Kotawaringin Timur
211.	Kabupaten Kotawaringin Barat
212.	Kota Banjar Baru
213.	Kabupaten Tanah Laut
214.	Kabupaten Kota Baru
215.	Kabupaten Banjar
216.	Kabupaten Barito Kuala
217.	Kabupaten Tapin
218.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
219.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
220.	Kabupaten Pasir
221.	Kabupaten Kutai Barat
222.	Kota Tarakan
223.	Kabupaten Kutai Timur
224.	Kabupaten Berau
225.	Kabupaten Malinau
226.	Kabupaten Bulungan
227.	Kabupaten Bolaang Mongondow

NO	DAERAH EKONOMI MAJU
228.	Kabupaten Minahasa
229.	Kabupaten Sangihe
230.	Kabupaten Minahasa Selatan
231.	Kabupaten Minahasa Utara
232.	Kota Bitung
233.	Kota Tomohon
234.	Kabupaten Gorontalo
235.	Kota Gorontalo
236.	Kabupaten Banggai
237.	Kabupaten Donggala
238.	Kabupaten Bulukumba
239.	Kabupaten Maros
240.	Kabupaten Gowa
241.	Kota Palopo
242.	Kota Pare-pare
243.	Kabupaten Tana Toraja
244.	Kabupaten Luwu
245.	Kabupaten Pinrang
246.	Kabupaten Sidenreng Rappang
247.	Kabupaten Wajo
248.	Kabupaten Bone
249.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
250.	Kabupaten Soppeng
251.	Kabupaten Enrekang
252.	Kabupaten Mamuju Utara
253.	Kabupaten Muna
254.	Kabupaten Konawe
255.	Kabupaten Kolaka
256.	Kota Kendari
257.	Kota Bau-bau
258.	Kabupaten Jembrana
259.	Kabupaten Tabanan
260.	Kabupaten Klungkung
261.	Kabupaten Bangli
262.	Kabupaten Karangasem
263.	Kabupaten Buleleng
264.	Kabupaten Sumbawa
265.	Kota Bima
266.	Kota Ambon
267.	Kabupaten Maluku Tengah
268.	Kota Ternate
269.	Kota Jayapura
270.	Kabupaten Fak Fak
271.	Kabupaten Sorong

4. KLASIFIKASI DAERAH EKONOMI KURANG MAJU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	DAERAH EKONOMI KURANG MAJU
ZONA 4	
1.	Kabupaten Simeulue
2.	Kabupaten Aceh Singkil
3.	Kabupaten Aceh Selatan
4.	Kabupaten Aceh Tenggara
5.	Kabupaten Aceh Timur
6.	Kabupaten Aceh Tengah

NO.	DAERAH EKONOMI KURANG MAJU
7.	Kabupaten Aceh Barat
8.	Kabupaten Aceh Pidie
9.	Kabupaten Aceh Utara
10.	Kabupaten Aceh Barat Daya
11.	Kabupaten Gayo Lues
12.	Kabupaten Aceh Tamiang
13.	Kabupaten Nagan Raya
14.	Kabupaten Aceh Jaya
15.	Kabupaten Bener Meriah
16.	Kabupaten Dairi
17.	Kabupaten Humbang Hasundutan
18.	Kabupaten Pakpak Bharat
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai
20.	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
21.	Kabupaten Solok Selatan
22.	Kabupaten Dharmasraya
23.	Kabupaten Lingga
24.	Kabupaten Natuna
25.	Kabupaten Tebo
26.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
27.	Kabupaten Sarolangun
28.	Kabupaten Lahat
29.	Kabupaten Musi Rawas
30.	Kabupaten Ogan Ilir
31.	Kabupaten OKU Selatan
32.	Kabupaten Bangka Selatan
33.	Kabupaten Bangka Tengah
34.	Kabupaten Kaur
35.	Kabupaten Seluma
36.	Kabupaten Mukomuko
37.	Kabupaten Lebong
38.	Kabupaten Kepahiang
39.	Kabupaten Bengkulu Selatan
40.	Kabupaten Rejang Lebong
41.	Kabupaten Lampung Barat
42.	Kabupaten Situbondo
43.	Kabupaten Bondowoso
44.	Kabupaten Bangkalan
45.	Kabupaten Sampang
46.	Kabupaten Pamekasan
47.	Kabupaten Sambas
48.	Kabupaten Melawi
49.	Kabupaten Sekadau
50.	Kabupaten Sintang
51.	Kabupaten Landak
52.	Kabupaten Bengkayang
53.	Kota Singkawang
54.	Kabupaten Lamandau
55.	Kabupaten Sukamara
56.	Kabupaten Seruyan
57.	Kabupaten Barito Timur
58.	Kabupaten Gunung Mas
59.	Kabupaten Hulu Sungai Utara
60.	Kabupaten Tabalong
61.	Kabupaten Tanah Bumbu
62.	Kabupaten Balangan
63.	Kabupaten Nunukan
64.	Kabupaten Penajam Paser Utara
65.	Kabupaten Kepulauan Talaud
66.	Kabupaten Boalemo
67.	Kabupaten Pohuwato
68.	Kabupaten Bone Bolango
69.	Kabupaten Banggai Kepulauan

NO.	DAERAH EKONOMI KURANG MAJU
70.	Kabupaten Morowali
71.	Kabupaten Poso
72.	Kabupaten Toli-Toli
73.	Kabupaten Buol
74.	Kabupaten Parigi Moutong
75.	Kabupaten Tojo Una Una
76.	Kabupaten Luwu Timur
77.	Kabupaten Luwu Utara
78.	Kabupaten Barru
79.	Kabupaten Sinjai
80.	Kabupaten Takalar
81.	Kabupaten Jenepono
82.	Kabupaten Bantaeng
83.	Kabupaten Selayar
84.	Kabupaten Majene
85.	Kabupaten Polewali Mandar
86.	Kabupaten Mamasa
87.	Kabupaten Mamuju
88.	Kabupaten Buton
89.	Kabupaten Konawe Selatan
90.	Kabupaten Bombana
91.	Kabupaten Wakatobi
92.	Kabupaten Kolaka Utara
93.	Kabupaten Lombok Barat
94.	Kabupaten Lombok Tengah
95.	Kabupaten Lombok Timur
96.	Kabupaten Dompu
97.	Kabupaten Bima
98.	Kabupaten Sumbawa Barat
99.	Kabupaten Sumba Barat
100.	Kabupaten Sumba Timur
101.	Kabupaten Kupang
102.	Kabupaten Timor Tengah Selatan
103.	Kabupaten Timor Tengah Utara
104.	Kabupaten Belu
105.	Kabupaten Alor
106.	Kabupaten Lembata
107.	Kabupaten Flores Timur
108.	Kabupaten Sikka
109.	Kabupaten Ende
110.	Kabupaten Ngada
111.	Kabupaten Manggarai
112.	Kabupaten Rote Ndao
113.	Kabupaten Manggarai Barat
114.	Kabupaten Seram Bagian Barat
115.	Kabupaten Seram Bagian Timur
116.	Kabupaten Kepulauan Aru
117.	Kabupaten Buru
118.	Kabupaten Maluku Tenggara
119.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
120.	Kota Tidore Kepulauan
121.	Kabupaten Halmahera Timur
122.	Kabupaten Halmahera Utara
123.	Kabupaten Halmahera Selatan
124.	Kabupaten Kepulauan Sula
125.	Kabupaten Halmahera Tengah
126.	Kabupaten Halmahera Barat
127.	Kabupaten Biak Numfor
128.	Kabupaten Yapen Waropen
129.	Kabupaten Supiori
130.	Kabupaten Waropen
131.	Kabupaten Keerom
132.	Kabupaten Sarmi

NO.	DAERAH EKONOMI KURANG MAJU
133.	Kabupaten Boven Digoel
134.	Kabupaten Puncak Jaya
135.	Kabupaten Nabire
136.	Kabupaten Jayapura
137.	Kabupaten Merauke
138.	Kabupaten Sorong Selatan
139.	Kabupaten Manokwari
140.	Kabupaten Kaimana
141.	Kabupaten Teluk Bintuni
ZONA 5	
142.	Kabupaten Jayawijaya
143.	Kabupaten Paniai
144.	Kabupaten Pegunungan Bintang
145.	Kabupaten Yahukimo
146.	Kabupaten Asmat
147.	Kabupaten Mappi
148.	Kabupaten Tolikara
149.	Kabupaten Raja Ampat
150.	Kabupaten Teluk Wondama

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD NUH